

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pelayanan Kepemudaan dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro telah berjalan efektif, tetapi masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek agar kontribusinya terhadap peningkatan IPP menjadi lebih terukur dan berkelanjutan.

Pada indikator pencapaian tujuan, pelayanan kepemudaan Dinpora Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan kesesuaian dengan arah pembangunan pemuda. Program-program seperti pelatihan public speaking, workshop kewirausahaan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, serta kegiatan KIPAN telah berkaitan dengan beberapa domain IPP, terutama pendidikan dan pelatihan, ketenagakerjaan layak, serta partisipasi dan kepemimpinan. Namun demikian, pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal karena domain ketenagakerjaan layak masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa program kepemudaan perlu lebih diarahkan pada peningkatan akses kerja, pengembangan usaha pemuda, pengurangan NEET, dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada indikator ketepatan pelaksanaan, pelayanan kepemudaan Dinpora Bojonegoro dapat dikatakan cukup tepat. Hal ini terlihat dari sasaran program yang diarahkan kepada pemuda usia 16–30 tahun, keterlibatan peserta dari berbagai kecamatan, serta pelaksanaan kegiatan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan pemuda. Program kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan organisasi telah menunjukkan adanya upaya Dinpora untuk menjangkau kelompok pemuda sebagai sasaran pelayanan. Akan tetapi, ketepatan pelaksanaan masih perlu diperkuat melalui pendataan peserta yang lebih rinci, pemerataan akses program, keterbukaan jadwal kegiatan, serta monitoring setelah program selesai dilaksanakan.

Pada indikator manfaat bagi kelompok sasaran, pelayanan kepemudaan Dinpora telah memberikan manfaat bagi pemuda, terutama dalam peningkatan keterampilan, kepercayaan diri, pengetahuan kewirausahaan, jejaring sosial, dan partisipasi organisasi. Program-program yang dilaksanakan memberi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kapasitas, dan terlibat dalam kegiatan yang produktif. Namun, manfaat tersebut masih lebih banyak terlihat pada manfaat langsung setelah kegiatan. Manfaat jangka panjang seperti keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, keterlibatan organisasi secara berkelanjutan, dan akses kerja peserta masih perlu diukur secara lebih sistematis.

Pada indikator adaptabilitas organisasi, Dinpora Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan pemuda. Hal ini terlihat dari adanya program soft skill,

kewirausahaan, pembinaan organisasi, KIPAN, serta pemutakhiran data organisasi kepemudaan. Program-program tersebut menunjukkan bahwa Dinpora mulai menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan kebutuhan pemuda. Namun, adaptabilitas organisasi masih perlu diperkuat, terutama dalam penggunaan data IPP sebagai dasar perencanaan program, respons terhadap isu NEET, penguatan inklusivitas gender, serta koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah dan organisasi kepemudaan.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini adalah bahwa efektivitas pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro dalam rangka peningkatan IPP telah berjalan efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pelayanan yang ada sudah memberikan kontribusi terhadap pembangunan pemuda, tetapi masih perlu diperkuat melalui perencanaan berbasis data, pemerataan sasaran, tindak lanjut program, evaluasi outcome, dan kerja sama lintas sektor agar peningkatan IPP Kabupaten Bojonegoro dapat dicapai secara lebih nyata.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pertama, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat perencanaan program kepemudaan berbasis data IPP. Setiap program sebaiknya dikaitkan secara jelas dengan domain IPP yang ingin ditingkatkan, seperti pendidikan dan pelatihan, ketenagakerjaan layak,

partisipasi dan kepemimpinan, kesehatan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender. Dengan cara tersebut, program kepemudaan tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan dan jumlah peserta, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan indikator pembangunan pemuda.

2. Kedua, Dinpora perlu memperkuat pendataan peserta dan monitoring pascakegiatan. Data peserta sebaiknya tidak hanya memuat nama dan asal kecamatan, tetapi juga jenis kelamin, usia, status pendidikan, status pekerjaan, jenis usaha, keanggotaan organisasi, serta perkembangan peserta setelah mengikuti program. Pendataan ini penting agar Dinpora dapat mengetahui apakah program benar-benar menjangkau pemuda yang membutuhkan layanan dan apakah program memberikan manfaat jangka panjang.
3. Ketiga, program kepemudaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kewirausahaan perlu diperkuat karena domain ketenagakerjaan layak masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Dinpora dapat mengembangkan program pelatihan yang lebih aplikatif, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, pemasaran digital, serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Program kewirausahaan juga perlu dilanjutkan dengan pembinaan berkelanjutan agar peserta tidak hanya memperoleh motivasi, tetapi benar-benar mampu mengembangkan usaha.
4. Keempat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Bappeda perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan pemuda. Isu

pemuda tidak dapat diselesaikan oleh Dinpora saja karena berkaitan dengan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, UMKM, perizinan, dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi atau rencana aksi daerah kepemudaan yang melibatkan Dinpora, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, dinas yang menangani UMKM, organisasi kepemudaan, karang taruna, serta komunitas pemuda.

5. Kelima, organisasi kepemudaan dan pemuda penerima layanan diharapkan lebih aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kepemudaan. Pemuda tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga perlu menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan kebutuhan, memberi masukan, dan menggerakkan kegiatan positif di masyarakat. Dengan partisipasi tersebut, pelayanan kepemudaan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pemuda di lapangan.
6. Keenam, untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur pengaruh program kepemudaan terhadap indikator IPP secara lebih terukur. Peneliti berikutnya juga dapat meneliti secara khusus satu domain IPP, misalnya ketenagakerjaan layak, NEET, kewirausahaan pemuda, partisipasi organisasi, atau kesetaraan gender, agar analisis yang dihasilkan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pemuda Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bojonegoro, B. P. S. K. (2025). Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. <https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/f2c38faeb30422c19e59d070/kabupaten-bojonegoro-dalam-angka-2025.html>
- Creswell, J. (2014). *Desain penelitian: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (edisi ke-4). Sage.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran..* Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.) (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro. (2023). Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro. .
- DINPORA Bojonegoro. <https://dinpora.bojonegorokab.go.id/menu/detail/11/TENTANGDINPORA>
- Efendi, A. (2020). Studi korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. . *Jurnal Paradigma*, 9(1), 39–48. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/4381>
- Fauzi, A. , & Sari, N. (2024). Analisis program kepemudaan berprestasi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan olahraga (Studi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung). . *Jurnal Otonomi*, 5(1), 45–60. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/view/5267/2503>
- Hakim, M. L. , & Qurbani, I. D. (2021). *Kebijakan pembangunan pemuda: Strategi dan tantangannya. .* Malang: Media Nusa Creative.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2024). FAQ Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). . Kemenpora. <https://ipp.kemenpora.go.id/faq>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2024. . https://satudata.kemenpora.go.id/cdn/uploads/produk/7/laporan-2024_ipp-

2023.pdf

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muttaqin, I. A. , Aswi, & Fahmuddin, M. S. (2024). Analisis regresi spasial pendekatan area Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2022 di Indonesia. . *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(2), 541–552.
- Nadia, K. H., & Rahman, F. (2022). LAPORAN! dan partisipasi masyarakat di Bojonegoro. *Jurnal Pelayanan Publik*, 10(3), 200–215. <https://doi.org/http://repository.unisma.ac.id/id/eprint/12346>
- Ningtyas, A. L. , Ati, N. U. , & Suyeno. (2019). Efektivitas DISPORA dalam pemberdayaan generasi muda (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*, 12(3), 1–9. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3691>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rakhmawan, S. A. (2021). Proposing additional indicators for Indonesia youth development index with smaller level analysis: A case study in South Kalimantan Province. . *Journal of Statistics and Its Applications*, , 5(2), 220–227. <https://doi.org/10.29244/ijsa.v5i2p220-227>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabet.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (2014).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (2009).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (2009).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. (2009).
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori & proses*. Media Pressindo.
- Winarno, B. (2010). *Manajemen pemerintahan*. Media Pressindo.